

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

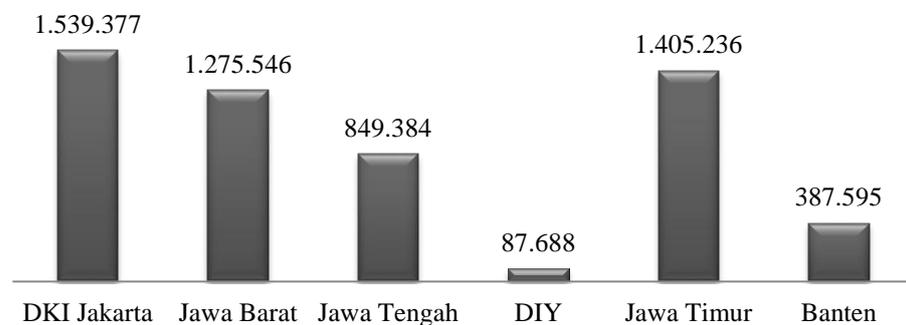
### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi seringkali menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional negara-negara berkembang. Pembangunan daerah menurut Todaro dalam Suryana (2000) diartikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental, dan lembaga nasional termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Pembangunan ekonomi dapat memberikan dampak negatif, hal ini dikarenakan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu pembahasan mengenai pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah atau regional.

Pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999b) diartikan sebagai proses pengelolaan sumber daya daerah dan pembentukan kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dengan tujuan menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat. Selain itu pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang merata. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah

tersebut tidaklah mudah, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi antar daerah sehingga corak pembangunan dan kebijakan tidak dapat disamakan. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang diambil haruslah disesuaikan dengan keadaan daerah tersebut.

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat memudahkan pemerintah untuk melakukan pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, setiap daerah akan lebih leluasa untuk menentukan sektor atau komoditas yang akan diprioritaskan pengembangannya. Sektor-sektor yang pengembangannya diprioritaskan ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor unggulan ini akan dapat mendorong perkembangan sektor-sektor lain (Tarigan, 2005).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017

**Gambar 1.1**  
**PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milliar)**

Adisasmita (2014) mengungkapkan bahwa PDRB merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Data BPS pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 DKI Jakarta

memiliki PDRB tertinggi di Pulau Jawa, sedangkan provinsi dengan PDRB terendah di tahun 2016 adalah DIY. PDRB DKI Jakarta Rp.1.539.377.000.000.000,00 pada tahun 2016, sedangkan PDRB DIY jauh dibawah PDRB Provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu hanya sebesar Rp.87.688.000.000.000,00.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017

**Gambar 1.2**  
**Peranan Kabupaten/Kota dalam Pembentukan Ekonomi DIY**  
**Tahun 2016 (Persen)**

Provinsi DIY terdiri dari Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, dan Kab. Gunung Kidul, kontribusi yang diberikan lima Kabupaten/Kota ini terhadap pembentukan ekonomi DIY beragam. Data BPS pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Kabupaten Sleman memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan ekonomi DIY, sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Sleman memberikan kontribusi sebesar 33,59%. Kabupaten Kulon Progo hanya memberikan kontribusi sebesar 7,55% pada pembentukan ekonomi DIY.

Selain memberikan kontribusi terendah Kabupaten Kulon Progo juga memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY, seperti yang terlihat dalam Gambar 1.3. Kabupaten Sleman memiliki Pertumbuhan ekonomi tertinggi di DIY, yaitu sebesar 5,25%. Kota Yogyakarta 5,11% dibawah Sleman. Kabupaten Bantul sebesar 5,06% dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 4,89%. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 hanya sebesar 4,76%.

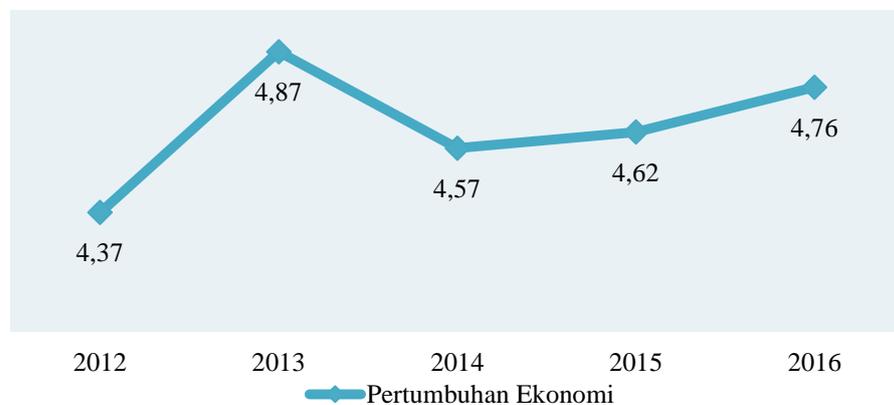


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017

**Gambar 1.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY Tahun 2016**

Pertumbuhan ekonomi Kulon Progo yang hanya sebesar 4,76% ini jauh dibawah target. Astungkara selaku Sekertaris Daerah Kulon Progo dalam Sutarmi (2017) menyampaikan bahwa kegagalan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan target dari 12 lapangan usaha tidak tercapai. Pada tahun 2016 sektor pertanian, jasa dan tambang mengalami penurunan. Penurunan pada sektor tambang menjadi salah satu faktor dominan penyebab kegagalan dalam mencapai target pertumbuhan

ekonomi, penurunan ini dikarenakan perubahan kewenangan. Sementara sektor pertanian walaupun mengalami penurunan tetapi masih cukup bagus. Saat ini Pemkab sedang mengupayakan untuk menyegerakan pembangunan infrastruktur agar dapat mendorong lapangan usaha yang ada. Beberapa infrastruktur yang dibangun di Kabupaten Kulon Progo saat ini adalah pembangunan konstruksi pasir besi, percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan pembangunan jalur lintas selatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017

**Gambar 1.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo**  
**Tahun 2012 sampai 2016**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016 tidak selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kulon Progo mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 4,87%. Namun, pada tahun 2014 turun menjadi 4,57%. Kemudian dari tahun 2014 hingga 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo terus mengalami kenaikan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Muhyadi dalam Sutarmi (2015) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo masih sangat lambat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di DIY. Kulon Progo memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat, padahal potensi yang dimiliki cukup besar. Diungkapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan distingtif tersendiri dibandingkan kabupaten lain di DIY. Lokasi yang strategis dan berada di jalur lintas perekonomian Pulau Jawa bagian selatan, serta topografi yang menarik menjadikan Kulon Progo sebagai daerah yang sangat kompetitif untuk mengembangkan industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Kabupaten Kulon Progo juga memiliki keindahan alam yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Keindahan alam Kabupaten Kulon Progo terpancar dari Perbukitan Menoreh dan Pesisir Samudra Indonesia.

Tidak hanya memiliki potensi wisata, tapi Kabupaten Kulon Progo juga memiliki potensi yang besar di sektor pertanian. Berdasarkan sensus pertanian pada tahun 2013 dapat diketahui bahwa rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga pertanian di Kabupaten Kulon Progo menempati posisi kedua di DIY. Berdasarkan data BPS pada Tabel 1.1 terlihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 memberikan kontribusi terbesar pada PDRB.

**Tabel 1.1**  
**Distribusi PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Persen)**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,17	19,70	18,66	18,13	17,61
Pertambangan dan Penggalian	1,57	1,57	1,52	1,46	1,42
Industri Pengolahan	11,84	12,13	12,59	12,46	12,52
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13
Konstruksi	8,48	8,43	8,47	8,45	8,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,13	13,19	13,27	13,51	13,70
Transportasi dan Pergudangan	8,89	8,75	8,54	8,46	8,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,56	3,65	3,65	3,68	3,72
informasi dan Komunikasi	6,06	6,13	6,30	6,35	6,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,54	2,75	2,93	3,02	3,01
Real Estate	3,55	3,53	3,56	3,61	3,64
Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,01	8,03	8,14	8,17	8,28
Jasa Pendidikan	6,20	6,15	6,30	6,45	6,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,46	1,48	1,52	1,55	1,57
Jasa Lainnya	3,96	3,95	4,00	4,13	4,16
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo, 2017

Sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Kulon Progo bergerak turun dan naik secara perlahan. Penggalian dan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan Kabupaten Kulon Progo diharapkan akan memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berdampak baik pada perekonomian Kulon Progo. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai

sektor ekonomi unggulan Kabupaten Kulon Progo dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Kulon Progo.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Mengingat luasnya ruang lingkup pembangunan ekonomi daerah dan terbatasnya waktu yang dimiliki oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti akan membatasi pembahasan masalah pada analisis sektor ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Sektor ekonomi apakah yang menjadi sektor ekonomi potensial, basis dan memiliki keunggulan kompetitif serta memiliki spesialisasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo?
2. Sektor ekonomi apakah yang menjadi pemacu pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Kulon Progo?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang dapat menjadi sektor ekonomi potensial, basis dan memiliki keunggulan kompetitif serta memiliki spesialisasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang menjadi pemacu pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat seperti:

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai sektor ekonomi unggulan yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo.
2. Menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam hal penentuan atau perumusan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan perekonomian di daerah Kulon Progo.
3. Memudahkan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam hal perumusan kebijakan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan bagi penelitian-penelitian sejenis kedepannya.